

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA  
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI  
MASYARAKAT DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023**

**Oleh : Andrian Herlambang**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa sebagaimana pada pasal 26 ayat (1) kepala desa bewenang membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, yang menjadi landasan Pemerintahan Desa Tebing Tinggi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintahan desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa Tebing Tinggi dan untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pemerintahan desa Tebing tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa Tebing Tinggi. Dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, pemerintahan Desa Tebing Tinggi mengalami hambatan yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang di berikan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.

***Kata Kunci : Pembangunan, Pelayanan, Pemberdayaan.***

## **ABSTRACT**

*Law No. 6 of 2014 article 26 paragraph (1) states that the village head is in charge of organizing village government, carrying out village development, fostering village communities, and empowering village communities. In carrying out the duties of the village head as in article 26 paragraph (1) the village head is authorized to foster and improve the village economy and integrate it in order to achieve a productive scale economy for the greatest possible prosperity of the village community, which is the basis of the Tebing Tinggi Village Government to increase the economic resilience of the people of Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency by carrying out the development function, services, and community empowerment. The purpose of this study is to find out how the function of the Tebing Tinggi village government is in increasing the economic resilience of the Tebing Tinggi village community and to find out the factors that hinder the Tebing Tinggi village government in increasing the economic resilience of the Tebing Tinggi village community, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative method. This type of research is descriptive research. The research location is in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This type of research is descriptive research. The research location is in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. This study found that the Tebing Tinggi Village Government has carried out development, service, and empowerment functions in increasing the economic resilience of the Tebing Tinggi village community. In increasing the economic resilience of the community, the Tebing Tinggi Village government has experienced obstacles, namely the lack of community participation in the programs provided by the village government to increase the economic resilience of the Tebing Tinggi Village community.*

**Keywords :** *Development, Service, Empowerment.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya Undang-Undang tentang desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa sebagaimana pada pasal 26 ayat (1) kepala desa bewenang membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Menurut Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan PERDES, menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Tebing Tinggi memiliki luas wilayah 750 ha yang terdiri atas 5 dusun, 17 RT, dan 7 RW. Di tanah yang memiliki luas 750 ha ini, Desa Tebing Tinggi memiliki fasilitas publik yang cukup lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terdapat kantor balai desa, posyandu, badan usaha milik desa, 2 mesjid besar yaitu Masjid Baitul Makmur dan Masjid Al-Huda, 1 sekolah dasar yaitu SDN 004 Tebing Tinggi, 1 sekolah menengah pertama yaitu MTs Babussalam, 1 taman kanak-kanak yaitu TK Baitul Makmur, dan 1 paud yaitu Paud Jasa Bunda. Secara geografis Desa Tebing Tinggi, terletak diantara Sebelah Utara Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya, sebelah selatan Kelurahan Benai, Sebelah Barat Desa Benai Kecil, Sebelah Timur Desa Pulau Lancang / Desa Simandolak. Jarak Desa Tebing Tinggi ke ibu kota Kecamatan terdekat yaitu 0,5 KM.

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan yaitu selama 5 Menit. Jarak Desa Tebing Tinggi ke ibu kota Kabupaten yaitu 15 KM.

Desa Tebing Tinggi adalah desa hasil pemekaran dari sebuah Kenegerian yang bernama Kenegerian Simandolak yang terdiri dari 5 desa pada tahun 1979. Terdiri dari Desa Tebing Tinggi, Desa Pulau Lancang,

Desa Koto Simandolak, Desa Pulau Ingu, dan Desa Tanjung. Mata pencaharian masyarakat Desa Tebing Tinggi sudah terbilang heterogen. Mulai dari pedagang, kepolisian, pegawai negeri sipil, honorer pemerintahan, perawat, karyawan swasta, wiraswasta, guru, dosen, peternak ,dan petani.

**Tabel 1.1** Mata Pencarian Masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Profesi	Jumlah
1	Pedagang	47 orang
2	Kepolisian	9 orang
3	TNI	6 orang
4	Pegawai Negri Sipil	84 orang
5	Honorer Pemerintahan	40 orang
6	Bidan Swasta	2 orang
7	Perawat Swasta	4 orang
8	Wiraswasta	17 orang
9	Karyawan Swasta	56 orang
10	Guru	26 orang
11	Buruh Harian Lepas	124 Orang
12	Kuli Bangunan	17 orang
13	Perangkat Desa	11 orang
14	Sopir	18 orang
15	Peternak	29 orang
16	Petani/Pekebun	274 orang
17	Petani Ikan	57 orang
18	Belum bekerja	118 orang

*Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023*

Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya

dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu

ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi Negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan/kecakapan, kemauan bekerja disiplin, etos kerja berkualitas tinggi, motivasi kerja bahkan menjadi teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Benai.

Penyelenggara pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan diwilayahnya.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pelayanan umum adalah merupakan

instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa tersebut. Agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dari para pempinan pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada pemerintahan desa. Adapun bentuk dari pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan kepada pemerintah Desa sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan dapat juga dilakukan melalui adanya dorongan dan bimbingan serta pengarahan kepada para pemerintahan Desa agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

Menurut Adisasmita (2006) pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh.

Mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu:

- a. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa.
- b. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
- c. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.
- d. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya.
- e. Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif.
- f. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus.
- g. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi

masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

Aparatur negara hendaklah selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih mempercepat proses penyelesaian urusan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, lebih berkualitas, lebih murah, lengkap dan tuntas. Untuk meningkatkan itu semua seyogyanya aparatur pemerintah pada semua level bidang menerapkan suatu konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat yaitu semua pemikiran perencanaan dan pelaksanaan tugas masyarakat. Segala kebijaksanaan perumusan program yang ditetapkan hendaklah berorientasi terhadap kepuasan masyarakat. Dengan adanya system pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari Pemerintahan Desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara professional dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Pusat menekankan empat bidang yang menjadi program pembangunan Desa yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan masyarakat Desa. Dengan undang-undang yang baru desa diberikan kewenangan secara besar dalam membangun dan mengelola desa.

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, pemerintah mengucurkan program dana desa. Pada Tahun 2015 pemerintah mulai mengucurkan dana desa yang langsung ditransfer dari pusat ke desa. Bahkan untuk mensukseskan dana desa, kementerian desa PDT dan transmigrasi meluncurkan empat program unggulan yaitu pengembangan BUMDesa, pengembangan produk kawasan perdesaan, embung desa dan sarana olah raga desa.

Pemerintahan Desa Tebing Tinggi memprioritaskan kegiatan ketahanan pangan yaitu dengan bertanam padi yang biasanya dilakukan satu kali dalam setahun menjadi lima kali dalam dua tahun. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi system perekonomian dan juga sebagai kebutuhan pangan bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi. Dengan adanya ketersediaan lahan yang cukup luas sebesar 50 ha menjadikan dorongan bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi untuk mengelola lahan tersebut menjadi sarana pertanian seperti yang diketahui bersama, Desa Tebing Tinggi memiliki tanah yang begitu subur sehingga cocok dijadikan untuk pertanian. Tanah tersebut bisa ditanami berbagai macam produk alam agar manusia bisa memenuhi kebutuhan utamanya. Padi merupakan komoditas yang paling cocok bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi dilihat

dari kondisi tanah, luas lahan, dan juga dari nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari komoditas padi tersebut. sehingga saat ini sarana pertanian Desa Tebing Tinggi memang sangat mengandalkan komoditas padi sebagai potensi yang dapat menunjang sistem ekonomi dan kebutuhan pangan bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi. Salah satu bukti keberhasilan pemerintahan desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi yaitu dengan pendapatan yang dihasilkan dari menanam padi. Hal ini terbukti karena masyarakat desa Tebing Tinggi melakukan penanaman padi lima kali dalam dua tahun. Sedangkan di desa lain yang ada di Kecamatan Benai hanya menanam padi satu kali dalam setahun. Setiap proses pelaksanaan penanaman padi diberi bantuan oleh pemerintahan Desa Tebing Tinggi dua kali dalam dua tahun berupa pengelolaan lahan menggunakan bajak sawah, bantuan pupuk, dan bantuan benih padi. Hasil padi tersebut dijual oleh masyarakat desa ke BUMDes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Tebing Tinggi program ini sudah berjalan sejak tahun 2020 sampai 2023.

Pemerintahan Desa Tebing Tinggi juga bekerja sama dengan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di Desa Tebing Tinggi untuk menggerakkan kelompok tani di bidang palawija, saat ini masyarakat Desa Tebing Tinggi sudah menikmati hasil palawija tersebut. Gabungan kelompok tani yang ada di Desa Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Kelompok tani Rumbio Serumpun

2. Kelompok tani Sempurna
3. Kelompok tani Kopput

4. Kelompok tani Serona Jaya

**Tabel 1. 2** Kategori perkembangan desa IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2023 Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKE 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
Benai	Banjar Benai	0,7167	0,7665	Maju
Benai	Talontam	0,7833	0,83	Mandiri
Benai	Gunung Kesiangan	0,8333	0,799	Maju
Benai	Pulau Kalimantan	0,7333	0,7587	Maju
Benai	Banjar Lopak	0,7667	0,794	Maju
Benai	Tanjung Simandolak	0,75	0,7732	Maju
Benai	Siberakun	0,8	0,8127	Maju
Benai	Pulau Tongah	0,6667	0,7644	Maju
Benai	Ujung Tanjung	0,7667	0,7737	Maju
Benai	Pulau Ingu	0,75	0,8151	Maju
Benai	Simandolak	0,8667	0,8502	Mandiri
Benai	Tebing Tinggi	1	0,8724	Mandiri
Benai	Pulaulancang	0,7333	0,7594	Maju
Benai	Benai Kecil	0,75	0,8208	Mandiri
Benai	Koto Benai	0,8333	0,8181	Mandiri

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023*

Pasal 1 peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun memutuskan Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan

ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a) Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial).
- b) Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan).



- c) Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan)
  - d) Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator keragaman masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Lembaga Ekonomi, dan Keterbukaan Wilayah).
  3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dari data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas-tugas pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah mulai berjalan efektif, dapat dilihat dari 15 desa yang terdapat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) Desa Tebing Tinggi sudah lebih berkembang dibandingkan desa-desa yang ada di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Tebing Tinggi sudah mandiri, namun masih ada beberapa masalah yang dihadapi pemerintahan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi yaitu:

1. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi belum berhasil merubah sebagian besar karakter dan kebiasaan masyarakat Desa Tebing Tinggi yang sudah terbiasa dengan pola kerja sebagai kuli atau makan gaji. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah mengajak masyarakat Desa Tebing Tinggi untuk merubah kebiasaan tersebut tetapi masyarakat kurang minat untuk mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi belum optimal dalam mengelolah BUMDES dan masih kurangnya SDM untuk pengelolaan BUMDES desa Tebing Tinggi untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hal tersebut penulis mengambil Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa Tebing Tinggi membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa Tebing Tiggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.

Berdasarkan Fenomena diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti adalah:

1. Bagaimana fungsi pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023?
2. Apa saja factor-faktor penghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui fungsi pemerintahan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoretis**

- 1) Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan tentang peran pemerintah.
- 2) Untuk mengembangkan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.
- 3) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Dari penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar strata satu.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis tentang peran pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singing.

### **D. Kerangka Teori Fungsi Pemerintahan Desa**

#### **Pemerintahan Desa**

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung dibawah Camat. Konteks desa, definisi umum tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), Menurut Hanif Nicolis, (2001).

UU 6 tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, manajemen pemerintahan desa di serahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola bola bottom up agar lebih cepat terwujud kemandirian dan kesejahteraan warga desa.

### **Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

Wasistiono dan M.Irwan Tahir. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan PERDES, menetapkan PERDES. persetujuan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

1. Tugas bidang pemerintahan
2. Tugas bidang pelayanan kepala masyarakat
3. Tugas bidang ketatausahaan

Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:32) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak merata dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Maka peran pemerintah menurut Rasyid (dalam Lobolo, 2010: 32, Fifianti 2018: 10-12), adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan

melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Rasyid (dalam Lobolo, 2010: 32).

2. Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Menurut Rasyid (dalam Lobolo 2010: 32, Fifianti 2018: 18-19) Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.
3. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator Peran Pemerintah sebagai fasilitator menurut Rasyid (dalam Muhadam Lobolo, 2010: 32, Fifianti 2018: 10-12) adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan ketrampilann, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

### **Konsep Ketahanan Ekonomi**

Menurut Pendal et.al (2009) (dalam tulisan Muin 2016:9) konsep ketahanan ekonomi dapat didekati melalui beberapa indikator kinerja ekonomi yang tetap. Indikator tersebut diantaranya berupa distribusi kerugian langsung, pemenuhan kebutuhan dasar dan kemampuan menghilangkan shock.

Menurut KBBI, Ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Sedangkan ekonomi menurut KBBI adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Jika ditinjau dalam konteks makro, ketahanan ekonomi dapat didefenisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah informan atau

“orang-dalam” pada latar penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tahapan 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi (verification).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Fungsi Pembangunan Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa.**

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa merupakan fungsi pemerintahan desa yang dimulai dari pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fungsi tersebut ada yang telah terlaksana dengan baik dan ada yang belum terlaksana dengan baik.

Salah satu bentuk ketahanan ekonomi yang terdapat di Desa Tebing Tinggi yaitu memprioritaskan kegiatan ketahanan pangan dengan bertanam padi yang biasanya dilakukan satu kali dalam setahun menjadi lima kali dalam dua tahun. Padi merupakan komoditas yang paling cocok bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi dilihat dari kondisi tanah, luas lahan, dan juga dari nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari komoditas padi tersebut, sehingga saat ini sarana pertanian Desa Tebing Tinggi memang sangat mengandalkan komoditas padi sebagai potensi yang dapat menunjang sistem ekonomi dan

kebutuhan pangan bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi.

Berikut adalah salah satu hasil wawancara bersama Bapak Andrisman selaku Kepala Desa Tebing Tinggi di Kantor Desa berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pembangunan:

*“Pelaksanaan pembangunan sudah kami lakukan, dengan membangun infrastruktur seperti tempat penggilingan padi, tempat pembuatan pupuk kompos, irigasi pertanian, gudang alat pertanian, sumur astetis harapan kami dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat di gunakan oleh masyarakat dengan baik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.”* (wawancara pada tanggal 21 Maret 2024)

Melalui hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya pemerintahan desa membangun infrastruktur untuk mengembangkan sumber daya alam di desa Tebing Tinggi. Pemerintahan desa telah melaksanakan fungsi pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sudah berjalاندengan baik.

Berdasarkan data fungsi pembangunan pemerintahan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan hasil wawancara yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembangunan pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi tahun 2023 sudah terlaksana. Beberapa infrasturktur yang dibangun untuk mengembangkan

sumber daya alam di Desa Tebing Tinggi di antaranya:

1. Sumur Artesis  
Fungsi dibangunnya sumur artesis di desa Tebing Tinggi untuk mempermudah masyarakat mengairi persawahan petani padi di desa Tebing Tinggi supaya sawah tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau.
2. Kantor BUMdes Desa Tebing Tinggi  
Fungsi dibangunnya kantor BUMDes di desa Tebing Tinggi untuk sekretariat dan tempat berdiskusi para pengelola BUMDes.
3. Gudang pertanian di Desa Tebing Tinggi  
Gudang pertanian di desa Tebing Tinggi berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat pertanian seperti mesin penggiling padi, mesin press kemasan beras, mesin perontok padi, dan lain-lain.
4. Irigasi pertanian Desa Tebing Tinggi  
Fungsi dibangunnya irigasi di desa Tebing Tinggi untuk mengaliri air dari bendungan dan sumur artesis ke sawah petani masyarakat desa Tebing Tinggi supaya sawah tidak kering.

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Pelayanan untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat**

Tujuan utama dari fungsi pelayanan pemerintahan desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat adalah mampu memberikan pelayanan guna

mendukung kegiatan ekonomi dengan membangun sarana dan prasarana di tingkat desa. Peneliti menyatakan pemerintahan desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan fungsi pelayanan dengan alasan bahwa pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan pelayanan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana di Desa Tebing Tinggi untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data sarana dan prasarana untuk pelayanan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi dan hasil wawancara yang penulis peroleh ditemukan bahwa pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan fungsi Pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi Untuk mendalami keterangan yang diberikan, penulis melakukan diskusi lebih lanjut dengan kepala Desa Tebing Tinggi perihal pelayanan terhadap masyarakat Desa Tebing Tinggi dan diperoleh informasi bahwa pemerintahan desa sudah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana di desa guna membantu masyarakat untuk

meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerintahan desa dalam melakukan fungsi pelayanan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Beberapa fungsi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Desa Tebing Tinggi di antaranya:

1. Program BUMDES Desa Tebing Tinggi  
Pemerintah Desa Tebing Tinggi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat menyediakan fasilitas pada setiap program BUMDES untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
2. Mesin Bajak Sawah  
Pemerintah Desa Tebing Tinggi menyediakan mesin bajak sawah untuk membantu masyarakat membajak sawah pada saat musim bertanam padi di Desa Tebing Tinggi.
3. Mesin Perontok Padi  
Pemerintahan desa Tebing Tinggi menyediakan mesin perontok padi untuk membantu petani padi merontokan gabah supaya perpisah dari jerami padi.
4. Motor Huller Penggiling Padi  
Pemerintahan desa Tebing Tinggi menyediakan motor Huller penggiling padi untuk mempermudah petani padi menggiling padi langsung di gudang padi petani.
5. Kendaraan Cair  
Pemerintah Desa Tebing Tinggi menyediakan kendaraan cair untuk membantu masyarakat mengangkut pupuk padi sampai ke sawah petani dan mengangkut

hasil panen padi petani sampai ke gudang petani tersebut.

6. Mesin Pompa Air  
Pemerintahan desa Tebing Tinggi menyediakan mesin pompa air untuk membantu masyarakat mengairi persawahan pada saat musim kemarau agar sawah tidak kekeringan.
7. Mesin Press Kemasan Beras  
Pemerintahan desa Tebing Tinggi menyediakan mesin press kemasan beras untuk membantu masyarakat mempacking hasil bertani padi yang akan di pasarkan
8. Mesin Olah Pupuk Kompos  
Pemerintahan desa Tebing Tinggi menyediakan mesin olah pupuk kompos untuk membantu masyarakat mengelola pupuk organik untuk persawahan petani masyarakat desa Tebing Tinggi.

### **C. Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat**

Fungsi pemberdayaan merupakan tugas dari pemerintahan desa sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu bukti, berikut merupakan kutipan hasil wawancara bersama Bapak Alfi Qadri selaku sekretaris desa di Kantor Desa Tebing Tinggi, terkait pelaksanaan fungsi pemberdayaan:

*“Pelaksanaan pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat sudah terlaksana dengan pemberdayaan masyarakat petani padi, kami memberi bantuan kepada petani padi seperti bantuan benih padi yang berkualitas, pupuk sawah, dan membantu petani untuk membajak sawah agar petani padi dapat menghasilkan hasil panen yang berlimpah sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi”* (wawancara pada tanggal 21 Maret 2024).

Peneliti menyatakan pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberdayakan BUMDes desa Tebing Tinggi untuk memberdayakan petani padi agar dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data pemberdayaan masyarakat petani desa Tebing Tinggi Tahun 2023 dapat diketahui bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sudah terlaksana, pemerintahan desa memberdayakan masyarakat petani padi karena sebagian besar masyarakat desa Tebing Tinggi sebagai petani padi. Bentuk pelaksanaan fungsi pemberdayaan di antaranya:

1. Melaksanakan pemberdayaan BUMDes  
Pemerintah Desa Tebing Tinggi melaksanakan pemberdayaan BUMDES untuk memberdayakan masyarakat petani padi, dan menerapkan program IP 200

terhadap petani padi dengan bertanam padi 5 kali dalam 2 tahun untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.

2. Pemberian bantuan kepada petani padi seperti bantuan benih padi yang berkualitas, pupuk sawah, dan membantu petani untuk membajak sawah agar dapat membantu petani dalam bertani padi.
3. Memberikan fasilitas sarana dan prasana kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
4. Membantu memasarkan beras hasil panen padi masyarakat Desa Tebing Tinggi untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.
5. Memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat dan memberikan fasilitas untuk petani dalam mengelola sumberdaya alam di Desa Tebing Tinggi, serta mengubah sudut pandang petani tidak hanya terpaku untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari namun juga memperoleh keuntungan dalam bertani.

#### **D. Faktor penghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Tebing Tinggi**

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa adalah salah satu fungsi pemerintahan desa, berdasarkan UU Republik Indonesia N0 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua asas UU No 6 Tahun tentang desa pasal 4 bertujuan untuk memajukan perekonomian



masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya pemerintahan desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pasti ada faktor-faktor yang menghambat pemerintahan desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Berikut merupakan salah satu bukti hasil wawancara bersama Bapak Andrisman selaku Kepala Desa Tebing Tinggi di Kantor Desa: *“Sejauh ini kendala kami dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat adalah masih kurangnya tenaga untuk pembinaan terhadap masyarakat dan masih kurang pemahamannya masyarakat terhadap perkembangan teknologi sehingga masyarakat menjadi agak lambat dan kurang berkembang.”* (wawancara pada tanggal 21 Maret 2024).

Melalui hasil wawancara tersebut dapat diketahui yang menghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat adalah kurangnya tenaga untuk pembinaan terhadap masyarakat dan masih kurang pemahamannya masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui yang beberapa faktor penghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di antaranya:

1. Kurangnya tenaga untuk pembinaan terhadap masyarakat dan masih kurang pemahamannya masyarakat terhadap perkembangan teknologi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program

kerja yang diberikan oleh pemerintah desa.

3. Karakter atau tradisi masyarakat yang sulit diubah. Hal ini berkenaan dengan cara kerja masyarakat dalam bertani yang biasanya hanya bertani padi satu kali dalam setahun.
4. Kurangnya SDM dalam mengelola BUMDes sehingga tidak ada masyarakat yang mengelolanya dan tidak beroperasinya sarana dan prasarana di BUMDes.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di Desa Tebing Tinggi kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi telah melaksanakan fungsi pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa tebing tinggi dengan membangun sarana dan prasarana di desa agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi sudah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi dengan memberdayakan BUMDes desa

untuk memberdayakan petani dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi karena sebagian besar masyarakat Desa Tebing Tinggi adalah bertani padi.

3. Pemerintahan Desa Tebing Tinggi melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan memberdayakan BUMDes Desa Tebing Tinggi karena BUMDes desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, selain itu pemerintahan Desa Tebing Tinggi memberdayakan petani padi menerapkan program IP 200 petani padi Desa Tebing Tinggi dengan bertanam padi 5 kali dalam 2 tahun supaya hasil padi tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, dengan melaksanakan program tersebut petani padi dapat menjual hasil bertani tersebut sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.
4. Faktor yang menjadi penghambat pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang di berikan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, seperti masih kurangnya SDM terhadap

pengelolaan BUMDes Desa Tebing Tinggi.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan pemerintahan Desa Tebing Tinggi untuk menambah lagi sarana untuk petani padi agar maksimal melayani petani padi di Desa Tebing Tinggi.
2. Penulis mengingatkan semua pemerintahan desa akan sumpah dan janji jabatan yang diucapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta selalu berupaya mewujudkan keharmonisan dan sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat untuk kemajuan Desa Tebing Tinggi.
3. Penulis menyarankankan pemerintahan desa merawat rembugan dalam forum rembuk desa, optimalkan RPJMDes, RKPDes.
4. Penulis menyarankan pemerintah desa untuk memberdayakan petani dengan memperbanyak mengadakan pelatihan atau sosialisasi untuk menambah pengetahuan petani agar menghasilkan panen yang lebih berlimpah.
5. penulis menyarankan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program-program yang di salurkan untuk meningkatkna ketahanan ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan*

*Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Marlina, L. (2023). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*. 17(5), 3067–3083.
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 11 Tahun 2022 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018 *tentang Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan*.
- Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 *tentang Desa, Menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan Nama Lain, selanjutnya disebut Desa*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.